



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 150 TAHUN 2021

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Produk Hukum Daerah, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/URPD PEMBAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENCAPAIAN
			HARU	GANTI	UBAH	GABUN		
1	Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		√			Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah	Triwulan IV
2	Sarana dan Prasarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				√	Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah	Triwulan III
3	Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				√	Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah	Triwulan IV
4	Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		√			UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya Revisi Pergub 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang	Triwulan II
5	Kewajiban Pembangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Perlunya pengaturan terkait mekanisme penerapan kewajiban pembangunan sebagai bentuk kontribusi gotong royong warga DKI Jakarta dalam mewujudkan penyediaan prasarana pelayanan umum untuk kepentingan publik	Triwulan III
6	Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Perlunya pengaturan mendetail dan operasional terkait mekanisme penerapan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih berkeadilan	Triwulan III
7	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		√			Akibat tingginya dinamika pembangunan dan perlu dilakukannya sinkronisasi prosedur penyelenggaraan bangunan gedung serta bangunan prasarana, maka perlu dilakukan peninjauan atas pengaturan Pergub No. 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Bangunan Gedung dengan muatan yang semakin disempurnakan untuk menyesuaikan kondisi saat ini	Triwulan II
8	Pengalihan Hak Membangun	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang menyebut salah satu bentuk Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) kode b yaitu Pengalihan Hak Membangun (TDR), memerlukan pengaturan yang lebih mendetail dan lebih operasional	Triwulan III
9	Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dalam penerapan sanksi pemanfaatan ruang memerlukan mekanisme terperinci terkait pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang, tidak hanya pada objek pelanggaran berupa bangunan gedung	Triwulan III

NO	JUDUL RANPERGUB	TAMA ED/UKED PEMRAKARS	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
10	Rencana Detail Tata Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya mengubah format Rencana Detail Tata Ruang menjadi setara Peraturan Kepala Daerah, dan perlu dilakukannya penyempurnaan pengaturan untuk dapat menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik dari internal maupun eksternal	Triwulan II
11	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan			√		UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya Revisi Pergub 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang	Triwulan III
12	Penyesuaian Administrasi Perizinan pada Bangunan Eksisting dengan Fungsi Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Keagamaan/Pribadatan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar bagi warga kota Jakarta dalam mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta kemudahan dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka diperlukan dukungan regulasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kesehatan dan keagamaan/peribadatan yang telah beroperasi dan secara nyata telah memberikan manfaat bagi warga Jakarta	Triwulan II
13	Tata Cara Distribusi Akses dan Aset Program Reforma Agraria	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Sebagai lanjutan dari policy brief yang disusun oleh Tim RISPRO UI (output PKS UI dan Pemda DKI Jakarta) serta belum adanya aturan yang memuat tata cara distribusi aset dan akses yang spesifik mengenai peningkatan kualitas kampung melalui Reforma Agraria di perkotaan	Triwulan III
14	Panduan Rancang Kota Area Dalam Tembok Kota Tua	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030	Triwulan III
15	Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit Bundaran HI	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Menindaklanjuti Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, pasal 16, setelah ditetapkan sebagai Pengelola Kawasan maka Pengelola Kawasan harus Menyusun Panduan Rancang Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 tentang Pemugasan PT. MRTJ sebagai pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara -Selatan MRTJ.	Triwulan III
16	Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit Pegangsaan Dua	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Menindaklanjuti Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, pasal 16, setelah ditetapkan sebagai Pengelola Kawasan maka Pengelola Kawasan harus Menyusun Panduan Rancang Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 dengan salah satu target KSD adalah Penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit Pegangsaan Dua.	Triwulan III

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAHASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
17	Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit Pulomas	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Menindaklanjuti Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, pasal 16, setelah ditetapkan sebagai Pengelola Kawasan maka Pengelola Kawasan harus Menyusun Panduan Rancang Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 dengan salah satu target KSD adalah Penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit Pulomas.	Triwulan III
18	Panduan Rancang Kota Kawasan Sentra Primer Tanah Abang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		√			Mewadahi penyesuaian rencana pembangunan di dalam Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan penyesuaian pemanfaatan ruang terkait dengan adanya rencana pembangunan baru dalam kawasan.	Triwulan II
19	Insentif Pembangunan Rumah Susun Umum Milik Tanpa Uang Muka dan Rumah Susun Umum Sewa Oleh Pelaku Pembangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Dalam rangka percepatan pemenuhan hunian layak dan terjangkau di Jakarta perlu pelibatan Pelaku Usaha dalam penyediannya, sehingga perlu disusun kebijakan berupa pemberian insentif kepada Pelaku Usaha yang menyediakan Rumah Susun	Triwulan I
20	Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		√			1. Peraturan Gubernur No. 128 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan SOTK dinas CKTRP 2. Penyesuaian terhadap UUCK	Triwulan II
21	Pengembalian Pemenuhan Intensitas Bangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		√			1. Berdasarkan Pasal 63 huruf (h) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 613 Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang menyebut bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi pelanggaran pembangunan namun tidak bisa dilaksanakan kegiatan pembongkaran maka pelanggar bangunan wajib mengembalikan intensitas bangunan yang dilanggar tersebut. 2. Berdasarkan Pasal 202 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebut bahwa pemulihan fungsi ruang menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar untuk mengembalikan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam RTR.	Triwulan II
22	Tata Cara Pengenaan dan Perhitungan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	√				Delegasi dalam Pasal 199 ayat (4) PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebut bahwa bentuk dan cara perhitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.	Triwulan III
23	Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			√		Menyesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, urusan yang dimaksud, yang mengacu pada Permendagri No.90 Tahun 2019	Triwulan I
24	Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			√		Ingub No. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi dan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu	Triwulan I

NO	JUDUL KANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMKAKARSA	JENIS KANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
25	Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			√		Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Triwulan IV
26	Penyelesaian Piutang Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Tindak Lanjut rekomendasi BPK pada laporan hasil pemeriksaan atas pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2015 dan 2016 Nomor 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/12/2016	Triwulan I
27	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Tindak Lanjut saran BPKP pada Laporan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah Bidang Koperasi dan UMKM tahun 2018 s.d Semester 1 tahun 2019 (30 Juni 2019) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor LHK-553/PW09.3/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Triwulan I
28	Kemetrologian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Peraturan pusat tentang metrologi legal sudah ada ketentuannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Kegiatan kemetrologian dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, namun Provinsi DKI Jakarta dengan kekhususannya belum mengatur tentang kemetrologian.	Triwulan II
29	Ketentuan Tarif Layanan di Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√			Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK Tahun 2016, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2003, telah diatur mengenai Ketentuan Sewa Kontrak Penggunaan Lahan dan/atau fasilitas Kerja di Lingkungan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.	Triwulan I
30	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			√		Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat terkait usulan "Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan gubernur tentang penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu" agar: 1. Mengakomodasi klausul yang mengatur mengenai penjenjangan peserta PKT Wirausaha Naik Kelas serta nomenklatur jenjang peserta PKT tersebut berdasarkan skala usaha dengan kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan penetapan target waktu yang terukur untuk pengembangan skala usaha peserta PKT Wirausaha Naik Kelas. 2. Mensyaratkan adanya izin usaha untuk dapat mengikuti program peningkatan kapasitas wirausaha lainnya maupun kegiatan dan fasilitasi lainnya dalam pelaksanaan PKT bagi peserta PKT yang telah memulai atau menjalani usaha namun belum memiliki izin usaha.	Triwulan II
31	Kemitraan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, merinci ketentuan pola kemitraan antara pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM, (khususnya Jakpreneur) yang ada di Peraturan Daerah tersebut	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	CABUT	UBAH	CABUT		
32	Penyelenggaraan Sentra UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan melalui penyelenggaraan sentra usaha mikro, kecil dan menengah secara lebih optimal, profesional dan berkesinambungan serta dapat terintegrasi dengan kepariwisataan	Triwulan I
33	Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√			Revisi Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini.	Triwulan I
34	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√				Tindak Lanjut saran BPKP pada Laporan audit kinerja pelayanan pemerintah daerah Bidang Koperasi dan UMKM tahun 2018 s.d Semester 1 tahun 2019 (30 Juni 2019) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor LHAK-553/PW09.3/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Triwulan I
35	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2015 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			√		Adanya Perubahan Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, yang telah masuk dalam propem Perda Tahun 2022, maka perlu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan Pergub Nomor 208 Tahun 2015 sebagai produk hukum turunan Perda dimaksud	Triwulan IV
36	Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup	√				Sampah B3 rumah tangga merupakan jenis sampah spesifik, hingga saat ini belum adanya aturan daerah di wilayah DKI Jakarta khususnya mengenai pengelolaan sampah B3 rumah tangga. Sebagai amanat Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dimana Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota melalui diseminasi perda di bidang pengelolaan sampah.	Triwulan III
37	Strategi Pengendalian Pencemaran Udara	Dinas Lingkungan Hidup	√				Penyusunan berdasarkan penugasan dalam Instruksi Gubernur No 61 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengendalian Pencemaran Udara dari sektor transportasi darat pada Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 untuk menetapkan grand design Pengendalian Pencemaran Udara dalam bentuk perencanaan makro yang bersifat tidak mengikat pihak di luar Pemprov DKI dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.	Triwulan III
38	Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	√				Ingub No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021 - 2022 dimana tercantum target pembentukan BLUD Bidang Persampahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu syarat administrasi dari penerapan PPK BLUD adalah penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAKAS	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPATAN
			BAKU	GANTI	UBAH	CABUT		
39	Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	√				Ingub No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021 - 2022 dimana tercantum target pembentukan BLUD Bidang Persampahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Dalam penerapan PFK BLUD, diperlukan standarisasi tarif layanan yang akan dilakukan oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur	Triwulan II
40	Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan		√			Perintah Perundang-undangan; Regulasi turunan dari Permendikbud	Triwulan I
41	Tata Cara Perpindahan Peserta Didik	Dinas Pendidikan		√			Penyelenggaraan kewenangan daerah; Pergub DKI Jakarta No. 9 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik sudah tidak relevan dengan ketentuan Permendikbud	Triwulan II
42	Kontrak Kerja Individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan			√		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Triwulan I
43	Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan			√		Penyelenggaraan kewenangan daerah	Triwulan I
44	Tarif Layanan Unit Produksi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri BLUD	Dinas Pendidikan			√		Penyelenggaraan kewenangan daerah	Triwulan I
45	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar	Dinas Pendidikan			√		Penyelenggaraan kewenangan daerah	Triwulan I
46	Jakarta Sekolah Kolaborasi	Dinas Pendidikan	√				Penyelenggaraan Kewenangan Daerah	Triwulan I
47	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah/Madrasah Swasta melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013	Dinas Pendidikan				√	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Triwulan I
48	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Dinas Pendidikan		√			Perlu pengaturan lebih lanjut terkait penyediaan prasarana dan sarana pendidikan	Triwulan III
49	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri	Dinas Pendidikan		√			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Triwulan I
50	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri	Dinas Pendidikan		√			Penyelenggaraan Kewenangan Daerah	Triwulan I

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/URPD PEMERIKSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBERTUKAN	TARGET PENYEMPULAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
51	Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri BLUD	Dinas Pendidikan	√				Penyelenggaraan Kewenangan Daerah	Triwulan III
52	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan		√			Perintah Perundang-undangan; Regulasi turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.	Triwulan IV
53	Perubahan Atas Pergub 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			√		Usulan hasil audiensi dari Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terkait perpanjangan masa bakti anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta	Triwulan II
54	Perubahan Atas Pergub 191 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			√		Usulan hasil audiensi dari Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terkait kenalkan honorarium Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta	Triwulan III
55	Perubahan Atas Pergub 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			√		Usulan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing	Triwulan III
56	Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√				Perlu pengaturan lebih lanjut terkait Organisasi Kemasyarakatan	Triwulan II
57	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran	Badan Pendapatan Daerah		√			Penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Triwulan III
58	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel	Badan Pendapatan Daerah		√			Penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Triwulan II
59	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Badan Pendapatan Daerah	√				Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Tahun 2022	Triwulan I
60	Pencetakan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022	Badan Pendapatan Daerah	√				Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Triwulan I
61	Nilai Jual Objek Pajak 2021 Sunter-Pulo Gebang	Badan Pendapatan Daerah	√				Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pergub Nomor 17 Tahun 2021	Triwulan II
62	Sistem Manajemen Tiket Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	√				Pasal 124 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Triwulan I
63	Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan Keagamaan	Badan Pendapatan Daerah	√				Pasal 4 ayat (1) huruf b Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB-P2	Triwulan I

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMRAKARNA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAT PEMBERTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
64	Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan dan Pengawasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik	Badan Pendapatan Daerah	√				Penyelenggaraan Kewenangan Pemprov yang dijabarkan dalam KSD Tahun 2021 terkait Integrasi perubahan Data PBB-P2 dari BPHTB	Triwulan I
65	Pemberian Pengurangan PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah		√			Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf d, Pasal 42, dan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Triwulan II
66	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah			√		KSD	Triwulan I
67	Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		√			Berdasarkan Peraturan Pelaksana Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta menjamin Kepastian Hukum Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Guna Lebih Meningkatkan Kinerja Instansi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah	Triwulan I
68	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√			Perlu pengaturan lebih lanjut terkait Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Triwulan III
69	Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		√			Perintah PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Triwulan III
70	Revisi Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				√	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 yang masih menunggu peraturan pada tingkat pemerintah pusat	Triwulan III
71	Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas	Badan Kepegawaian Daerah		√			Mengganti Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 dikarenakan menyesuaikan perkembangan kebutuhan terkait materi ujian, Ujian Penyesuaian Ijazah SMP dan peraturan perundang-undangan terkait Ujian Peningkatan Pendidikan	Triwulan II
72	Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		√			1. Materi muatan sudah tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Menyesuaikan kebutuhan organisasi untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian	Triwulan III
73	Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke- 13	Badan Kepegawaian Daerah	√				Menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMRAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ACASAS PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
74	Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian Daerah	√				Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Pemerintah	Triwulan I
75	Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		√			Menyesuaikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Triwulan II
76	Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah		√			Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Triwulan I
77	Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	Badan Kepegawaian Daerah		√			Menyesuaikan perkembangan kebutuhan Pengelolaan PJLP serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	Triwulan I
78	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur	Badan Kepegawaian Daerah				√	Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	Triwulan I
79	Tata Cara Penempatan Dalam Jabatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah		√			Menyesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan organisasi	Triwulan III
80	Mutasi Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah		√			Tertib administrasi dalam pengelolaan mutasi pegawai	Triwulan III
81	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah				√	Materi muatan sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan dan perlu menyesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan organisasi. Materi muatan akan ditetapkan dalam keputusan	Triwulan III
82	Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		√			Penyesuaian terhadap perubahan ketentuan mengenai cuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Triwulan III

NO	JUDUL RANPERGUB	TAMA PD/UKPD PEMERAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN MEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
83	Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural	Badan Kepegawaian Daerah		√			Materi muatan sudah tidak relevan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	Triwulan IV
84	Pemberian Rekomendasi HGB di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah				√	<p>"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah."</p> <p>1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015.</p> <p>2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset yang berbunyi:</p> <p>"Pelaksanaan penelitian dan analisis pasar properti serta pelayanan konsultasi dan penilaian aset yang dikelola Unit Pengelola Manajemen Aset, termasuk penggunaan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan, pemanfaatan aset infrastruktur untuk menara seluler, jaringan mikrosel dan reklame."</p>	Triwulan I
85	Pengelolaan Menara Seluler dan Infrastruktur di atas Ruang dan/atau di Bawah Ruang Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				<p>Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset yang berbunyi:</p> <p>"Pelaksanaan penelitian dan analisis pasar properti serta pelayanan konsultasi dan penilaian aset yang dikelola Unit Pengelola Manajemen Aset, termasuk penggunaan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan, pemanfaatan aset infrastruktur untuk menara seluler, jaringan mikrosel dan reklame."</p>	Triwulan II
86	Penetapan Tarif Sewa Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				<p>Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset.</p>	Triwulan II
87	Tata Cara Lelang Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				<p>Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset.</p>	Triwulan II
88	Penetapan Titik Lelang Reklame	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				<p>Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset.</p>	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PENRAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	GABET		
89	Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Triwulan I
90	Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah				√	Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Triwulan II
91	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Badan Pengelolaan Aset Daerah				√	Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Triwulan II
92	Pedoman Penetapan Status Penggunaan BMD	Badan Pengelolaan Aset Daerah				√	Revisi Keputusan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap SKPD/UKPD	Triwulan I
93	Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Triwulan I
94	Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				TL Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/028-LHP/LJ tanggal 31 Januari 2020 tentang hal LHP atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Tahap II	Triwulan II
95	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Triwulan I
96	Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pembongkaran, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah				√	Revisi Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Prov. DKI Jakarta	Triwulan II
97	Tukar Menukar Atas Barang Milik Daerah Yang Terkena Pengembangan Dan/Atau Pembahasan Lehan	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Triwulan I
98	Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan I

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
99	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan I
100	Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan I
101	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah			√		Penambahan ketentuan terkait Bengkel Umum	Triwulan I
102	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah		√			Terdapat penyesuaian beberapa ketentuan	Triwulan I
103	Analisis Standar Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
104	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				√	Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan I
105	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan I
106	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan II
107	Perubahan Atas Pergub Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Menindaklanjuti Rancangan FMK baru terkait Penyelesaian Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN	Triwulan III
108	Penjabaran P2APBD Tahun 2021	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
109	Sistem Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
110	Bagan Akun Standar	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
111	Kebijakan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
112	Penyusunan SOP Analisis Standar Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
113	Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Program Peningkatan pcutausabaan keuangan daerah dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun	Triwulan III

NO	JUDUL KANPERGUB	NAMA PD/UMPD PEMRAKARSA	JENIS KANPERGUB				DAWAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
114	Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai/Pejabat Lain	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				√	Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan I
115	Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sewa Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
116	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
117	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV
118	Pinjaman Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	Triwulan IV
119	Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan I
120	Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan I
121	Penunjukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pengelola Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Rapim BKPRD tanggal 30 Juli 2021	Triwulan I
122	Penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Glodok-Kota Tua	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Instruksi Sekda Nomor 88 Tahun 2021	Triwulan III
123	Pelimpahan Kewenangan dari Gubernur kepada Perangkat Daerah dalam Pembinaan BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan II
124	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		√			Surat Jakpro Kepada Gubernur Nomor 110/UT0000/X/2021/0413 Tgl. 6 Oktober 2021	Triwulan I
125	Organ Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Kebutuhan SKPD/EUMD	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPATAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
126	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Surat PT Jakpro ke Gubernur ke Disbud Nomor 110/UT0000/XI/2021/0500 tanggal 17 November 2021 hal Laporan Pembangunan Revitalisasi PJK TIM	Triwulan I
127	Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Kebutuhan SKPD/BUMD	Triwulan II
128	Penetapan Pengelola Kawasan TOD Pegangsaan Dua dan Kawasan TOD Pulomas kepada PT Jakarta Propertindo	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Surat Biro PLH ke BOBUMD nomor 2099/-1.711.511 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur	Triwulan II
129	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam rangka Integrasi Transportasi Umum	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Memo Gubernur 19 April 2021 dan rapat di Asisten Perekonomian pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan agenda paparan update rencana pelaksanaan street furniture oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta	Triwulan I
130	Penunjukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pengelola Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Rapim BKPRD tanggal 30 Juli 2021	Triwulan I
131	Penunjukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Pasar Senen	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022	Triwulan II
132	Penunjukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Manggarai	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Bagian dari penataan stasiun Tahap II	Triwulan III
133	Penugasan PT MRT Jakarta (Persero) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Ancol Barat	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022	Triwulan IV
134	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor MRT Selatan-Utara Fase 1	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				KSD Tahun 2021 (Penambahan Benhil dan Setiabudi)	Triwulan II
135	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Temuan BPK atas Kinerja BPBUMD Tahun Buku 2016	Triwulan I
136	Penugasan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai Pengelola Kawasan Rorotan	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Hasil rapat Pimpinan BKPRD Tanggal 20 November 2020	Triwulan I

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA TD / UKPD PELAKSANA	JENIS RANPERGUB				DASAR / ALASAN PEMBERTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	UBAH	UBAH	CABUT		
137	Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Perintah Perundang-undangan, penyelenggaraan kewenangan	Triwulan I
138	Biaya Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Penyatuan pergub tarif air limbah perpipaan dan non perpipaan (L2T2)	Triwulan IV
139	Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PAL Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Penyesuaian dengan Perda Perumda PALJAYA	Triwulan IV
140	Penugasan Kepada Perumda PAMJAYA Dalam Pengelolaan IPA dan Mobile Tangki Air	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Disposisi Gubernur atas Surat permohonan penugasan dari Dinas Sumber Daya Air	Triwulan III
141	Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Pasal 10 ayat 2 Perda Perumda Dharma Jaya	Triwulan III
142	Pelimpahan Kewenangan dari Gubernur kepada Perangkat Daerah dalam Pembinaan BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I
143	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Penugasan dari Gubernur	Triwulan I
144	Penugasan Perumda PAMJAYA untuk Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Penugasan dari Gubernur	Triwulan I
145	Pemberian Insentif Dalam Rangka Pembinaan BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan II
146	Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Pasal 69 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Triwulan I
147	Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun Sederhana Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Schubungan dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu layanan perumahan pada Unit Pengelola Rumah Susun dan untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif pencrapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pengelola Rumah Susun, maka perlu dilakukan penyusunan, penetapan, pencrapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal serta untuk menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.	Triwulan I
148	Penyelenggaraan Penataan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Kegiatan Strategis Daerah	Triwulan III

NO.	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMRAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
149	Pengelolaan Rumah atau Kampung Susun Berbasis Koperasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Kegiatan Strategis Daerah	Triwulan III
150	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunan Rumah Susun Sederhana Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			√		Pasal 39 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Triwulan II
151	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sekretariat DPRD		√			PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Triwulan III
152	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat DPRD		√			Usulan Komisi A DPRD	Triwulan III
153	Pengelolaan Pemakaman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	√				Penjabaran Perda Nomor 3 Tahun 2007	Triwulan II
154	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	√				Penjabaran dari Pasal 79 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Triwulan I
155	Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air	√				Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM, Permen PU Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, Permen PU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM	Triwulan III
156	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	Dinas Bina Marga		√			Kegiatan Strategis Daerah dan Pelaksanaan SJUT oleh BUMD Penerima Penugasan dirasa belum sesuai dengan amanat Pergub penugasan menggantikan Pergub Nomor 110 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 69 Tahun 2020	Triwulan II
157	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	Dinas Bina Marga		√			Kegiatan Strategis Daerah dan Pelaksanaan SJUT oleh BUMD Penerima Penugasan dirasa belum sesuai dengan amanat Pergub penugasan menggantikan Pergub Nomor 70 Tahun 2020	Triwulan II
158	Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas	Dinas Bina Marga			√		Menindaklanjuti Raperda tentang Jaringan Utilitas	Triwulan III
159	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Complete Street Secara Terpadu	Dinas Bina Marga	√				Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	Triwulan I
160	Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Bina Marga	√				Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi	Triwulan I
161	Pengalihan Bentuk Kewajiban Kontribusi Tambahan dalam Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Bina Marga	√				Pasal 18 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBERTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
162	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	Biro Pemerintahan			√		Revisi Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Triwulan II
163	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan	Biro Pemerintahan			√		Penyesuaian Irian Tugas dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Triwulan IV
164	Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Biro Pemerintahan			√		Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Triwulan III
165	Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah	Biro Pemerintahan			√		1. Penyesuaian terhadap PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung Negara 2. Penyesuaian terhadap standar kebutuhan lahan dan bangunan Kantor Camat dan Lurah	Triwulan III
166	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			√		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Triwulan I
167	Pedoman Penyelenggaraan Hewan Kurban	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	√				Kegiatan Strategis Daerah	Triwulan I
168	Pemanfaatan dan Tata Cara Penyuluran Benih Ikan Hasil Balai Benih Ikan Dinas Perikanan DKI Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			√		Penyesuaian dengan perkembangan target sasaran	Triwulan II
169	Pertanian Perkotaan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	√				1. Instruksi Gubernur No.14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan 2. Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030	Triwulan II
170	Pedoman Pemberian Remunerasi Pegawai Non ASN Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	√				Penyelenggaraan Kewenangan Pemprov DKI Jakarta	Triwulan I
171	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			√		Penyelenggaraan Kewenangan Pemprov DKI Jakarta	Triwulan I
172	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			√		Penambahan sasaran penerima manfaat, perubahan koefisien UMP, perubahan waktu pendistribusian dan perubahan penganggaran	Triwulan I
173	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			√		Perubahan definisi dan ketentuan umum, perubahan ruang lingkup, perubahan persyaratan mutu dan keamanan pangan	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD/PEMRAKARS	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMERTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
174	Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	√				Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan terkendalinya inflasi diperlukan dukungan data dan terkendalinya inflasi diperlukan dukungan data dan informasi stok serta harga pangan yang akurat dari berbagai sumber pemilik pangan (pemerintah, penegak hukum, BUMN/ BUMD, para pelaku usaha pangan, daerah produsen dan masyarakat)	Triwulan IV
175	Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	√				1. Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan simplifikasi dari beberapa Peraturan Gubernur yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak, Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia, dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. 2. Pasal 39 ayat 5 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang mengatur bahwa persyaratan penerima bantuan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan I
176	Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut (amanat) Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	Triwulan I
177	Perdoman Pengangkatan Anak	Dinas Sosial	√				Merevisi Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak dan mengatur mengenai Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)	Triwulan II
178	Pelayanan Kesejahteraan Anak	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut (amanat) Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	Triwulan IV
179	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut (amanat) Pasal 35 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	Triwulan IV
180	Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna	Dinas Sosial			√		Perlu mengatur mengenai teknis pengelolaan aset Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) oleh Dinas Sosial khususnya dalam menangani kebersihan dan perawatan.	Triwulan III

NO	JUDUL RANPERGUB	TAMA PD/UKPD PEMRAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
181	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Panti	Dinas Sosial			√		<p>1. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.</p> <p>2. Perlu dilakukan optimalisasi program dan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Wanita tuna susila korban eksploitasi sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>3. Pasal 30 ayat (1) yang semula berbunyi "Jangka waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan terhadap WBS dari tahap penerimaan sampai dengan penyaluran, disesuaikan dengan berat ringannya permasalahan yang dihadapi WBS dan/atau paling lama 1 (satu tahun" diubah menjadi "Jangka waktu yang diperlukan dalam memberika pelayanan terhadap WBS pada Panti Sosial Bina Karya Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari tahap penerimaan sampai dengan penyaluran dilaksanakan / diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun."</p>	Triwulan II
182	Kampung Siaga Bencana (KSB)	Dinas Sosial	√				<p>1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.</p> <p>2. Kampung Siaga Bencana (KSB) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi kerentanan dan resiko bencana sehingga masyarakat yang tinggal didaerah rawan terjadi bencana dapat melakukan penanggulangan dengan tepat, cepat dan tanggap dengan semangat gotong royong.</p>	Triwulan IV
183	Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi	Dinas Kebudayaan	√				<p>Melaksanakan amanat Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi</p>	Triwulan IV
184	Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	√				<p>Melaksanakan KSD No. 19 Tahun 2021 renaksi Pergub Pengelolaan PKJ TIM</p>	Triwulan II
185	Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√				<p>Sebagai Pedoman Bagi Publik Dalam Melaksanakan Kegiatan MICE</p>	Triwulan II
186	Festival Sepanjang Tahun	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√				<p>Sebagai Pedoman Bagi Publik Dalam Menyelenggarakan Festival di Provinsi DKI Jakarta</p>	Triwulan II
187	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√				<p>Sebagai pedoman investor untuk melakukan investasi pariwisata di Kepulauan Seribu</p>	Triwulan III
188	Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	√				<p>Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018</p>	Triwulan IV

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMERIKSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
189	Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Marketplace dengan Sistem E-Order	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	√				Belum ada payung hukum terkait sistem e-order	Triwulan IV
190	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			√		Sudah tidak relevan dengan pendekatan Jakarta CorpU	Triwulan II
191	Tata Cara Penyusunan Analisa Kebutuhan Pembelajaran (Learning Need Analysis)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√				Untuk memenuhi kesenjangan kompetensi pegawai	Triwulan II
192	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		√			Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia	Triwulan IV
193	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			√		Perlu pengaturan lebih lanjut tentang Tugas Belajar	Triwulan IV
194	Magang Aparatur Sipil Negara	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√				Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan Bagi Pegawai ASN	Triwulan IV
195	Pembentukan Pusat Data, Informasi dan Teknologi Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√				Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah	Triwulan IV
196	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan RSUD dan RSKD	Dinas Kesehatan		√			Tarif yang diatur di dalam Pergub 117 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan RSUD Dan RSKD perlu dilakukan penyesuaian	Triwulan II
197	Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	√				Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Triwulan II
198	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	Dinas Kesehatan			√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Triwulan II
199	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga	Dinas Kesehatan			√		Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan	Triwulan III
200	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan			√		Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Triwulan IV
201	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan			√		Perlu penyesuaian terkait eksklusivitas pemberian penghasilan Pegawai Non ASN di Kepulauan Seribu	Triwulan I
202	Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (PRT) dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kesehatan	√				Perintah Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XVIII.	Triwulan II

NO	JUDUL PERATURAN	NAMA PD/UKPD PEMERIKSA	JENIS PERATURAN				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAILAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
203	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian	Dinas Kesehatan			√		Kewenangan daerah provinsi untuk menyesuaikan kebijakan terbaru sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.	Triwulan II
204	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Kesehatan	√				Turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan I
205	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah	Dinas Kesehatan	√				Setelah keluarnya Pergub 51 mengenai remunerasi Kelas A, B dan C maka remunerasi di RSUD Kelas D tidak memiliki payung hukum.	Triwulan I
206	Tarif Layanan UPT Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	√				Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai BLUD	Triwulan II
207	Standar Pelayanan Minimal pada UPT Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	√				Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai BLUD	Triwulan II
208	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Haji	Dinas Kesehatan	√				Program Haji merupakan salah satu program prioritas pemerintah sehingga dalam penyelenggaraannya diperlukan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Para Pihak yang berkepentingan.	Triwulan I
209	Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat	Dinas Kesehatan	√				Amanah UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.	Triwulan II
210	Pemeliharaan Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan		√			1. Seluruh Kota/Kab di Provinsi DKI Jakarta sudah menerima sertifikat eliminasi malaria 2. Persiapan pencapaian status eliminasi malaria tingkat provinsi.	Triwulan I
211	Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Dinas Kesehatan	√				Untuk akselerasi pengendalian HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta	Triwulan II
212	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum	√				Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Triwulan I
213	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		Sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi	Triwulan IV

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
214	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		Amanat PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	Triwulan IV
215	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		Simplifikasi Peraturan Gubernur terkait Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta	Triwulan IV
216	Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		Amanat PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah	Triwulan IV
217	Perubahan Ketiga Atas Pergub Nomor 1 Tahun 20017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		Penyesuaian klasifikasi dan mekanisme pengisian jabatan pelaksana pada satuan dan jabatan teknis tingkat ahli	Triwulan IV
218	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSU Adiyaksa	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		√			Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja RSU Adhyaksa	Triwulan IV
219	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		√			UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Triwulan II
220	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Tindak lanjut temuan BPK RI dan Pedoman Teknis	Triwulan I
221	Rencana Induk SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				1. Peraturan Presiden SPBE 95 Tahun 2018 2. Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019	Triwulan IV
222	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Manajemen Keamanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Triwulan IV
223	Aplikasi JAKI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Terbitnya Pergub/regulasi acuan lainnya untuk memastikan JAKI sebagai one stop app Pemprov DKI Jakarta (Blueprint arsitektur SPBE)	Triwulan I
224	Ekosistem Kota Cerdas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Menyiapkan visi dan strategi kota digital lintas Users	Triwulan I
225	Perencanaan, Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Pedoman perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Triwulan IV
226	Satu Pusat Data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Integrasi pengelolaan data	Triwulan I

NO	JUDUL KANPERGUB	NAMA ED/UKPD PEMRAKASA	JENIS KANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CADUT		
227	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Dinas Perhubungan				√	1. Telah disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jalan Berbayar Elektronik yang akan digunakan sebagai payung hukum yang lebih kuat, komprehensif dan terstruktur secara hierarki dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pengendalian lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta. 2. Substansi penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 telah berbeda dengan rencana penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik yang akan dilaksanakan (tertuang dalam Raperda).	Triwulan I
228	Pembatasan Penggunaan Kendaraan Pada Ruas Jalan Tertentu	Dinas Perhubungan	√				1. Aturan Kepemilikan Garasi. 2. Aturan Pemindahan Kendaraan. Untuk Penjabaran Pasal 62 sampai dengan Pasal 65, Pasal 139 dan Pasal 140 pada Peraturan Daerah 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	Triwulan I
229	Tarif Integrasi	Dinas Perhubungan	√				1. Kegiatan Strategis Daerah 29 Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko. 2. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tarif Integrasi Angkutan Penumpang Umum dalam Sistem Bus Rapid Transit. 3. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi. 4. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian <i>Mass Rapid Transit</i> dan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> .	Triwulan I
230	Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu	Dinas Perhubungan				√	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.	Triwulan I
231	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana <i>Mass Rapid Transit</i>	Dinas Perhubungan				√	Perlu adanya penyesuaian terkait penyelenggaraan perkeretaapian mengenai pendanaan, penugasan dan aset	Triwulan IV
232	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i>	Dinas Perhubungan				√	Perlu adanya penyesuaian terkait penyelenggaraan perkeretaapian mengenai pendanaan, penugasan dan aset	Triwulan IV
233	Alat Transportasi Berbasis Kayuh	Dinas Perhubungan	√				1. Tindak Lanjut Rapat Gubernur; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.	Triwulan I
234	Aplikasi Layanan Tiket Bus Secara Elektronik Dalam Jaringan Pada Terminal Antar Kota Antar Provinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	√				1. Kegiatan Strategis Daerah; 2. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Penjualan Tiket Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Secara Elektronik.	Triwulan I

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMERAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPALAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
235	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Layanan Publik dan pemberian Subsidi Yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta	Dinas Perhubungan		√			1. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta. 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan I
236	Pelayanan Gratis Transjakarta (Insentif Layanan Angkutan Umum)	Dinas Perhubungan	√				1. Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022; 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.	Triwulan I
237	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan			√		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.	Triwulan II
238	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan dan Pindahan Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan			√		Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Triwulan II
239	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan	Dinas Perhubungan			√		Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Triwulan II
240	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan	Dinas Perhubungan			√		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.	Triwulan II
241	Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	√				Persiapan penyelenggaraan kebijakan pengendalian lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
242	Perubahan Atas Peraturan Gubernur 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan			√		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.	Triwulan III
243	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Angkutan Jalan dengan Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan			√		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.	Triwulan III

NO	JUDUL RANERGUB	NAMA PD/UKPD PEMBAKASA	JENIS RANERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
244	Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	√				Persiapan penyelenggaraan kebijakan pengendalian lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta dalam hal pencrapan skema tarif Jalan Berbayar Elektronik yang akan diterapkan, termasuk besaran dan penyesuaiannya.	Triwulan IV
245	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	√				Penyiapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi penyedia jasa dalam rangka Operasional Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan IV
246	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71030)	Dinas Perhubungan			√		Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) diamanatkan bahwa "Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan".	Triwulan IV
247	Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	√				1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296).	Triwulan IV
248	Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pelayaran yang Menjadi Kewenangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	√				1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.	Triwulan IV
249	Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang	Dinas Perhubungan	√				1. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan Minimum Terminal.	Triwulan III
250	Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan (RIPP)	Dinas Perhubungan	√				Sebagai turunan dari Rencana Induk Transportasi Jakarta.	Triwulan IV
251	Penyelenggaraan Penyewaan Sepeda Terintegrasi Angkutan Umum Massal	Dinas Perhubungan	√				1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, lajur sepeda diintegrasikan dengan prasarana angkutan antar moda termasuk pada simpul angkutan umum massal (<i>Transit Oriented Development</i>) dengan tujuan agar sepeda dapat dijadikan salah satu alternatif kendaraan untuk memotong jarak pengguna angkutan umum massal dari dan menuju stasiun atau halte terdekat; 2. Bahwa saat ini telah berkembang penyewaan sepeda oleh masyarakat yang disediakan oleh penyelenggara sebagai kendaraan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam butir 1; 3. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, penyelenggaraan sepeda sewa sebagaimana dimaksud dalam butir 2 perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
252	Pencabutan Peraturan Gubernur yang Terkait Tarif Transportasi	Dinas Perhubungan				√	Pasal 10 ayat (1) Pergub 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi	Triwulan I

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA/PD/UKPD PEMBAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GAN TI	UBAH	CABUT		
253	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				Sesuai amanat PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Triwulan II
254	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	Triwulan II
255	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terutama pada ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai validata tingkat Daerah dan validata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Triwulan I
256	Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai paparan Bapak Drs. Nyoto Suwignyo, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada rapat Temu Konsultasi Bappenas tanggal 17 November 2021	Triwulan II
257	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai paparan Bapak Drs. Nyoto Suwignyo, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada rapat Temu Konsultasi Bappenas tanggal 17 November 2021	Triwulan II
258	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan II
259	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan III

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMRAKASA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBERTUKUAN	TARGET PENYAMPILAN
			BARU	CANTI	IDEAH	CABUT		
260	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan III
261	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan III
262	Wajib Lapor Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	√				UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan serta Permennaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	Triwulan III
263	Perubahan Atas Pergub Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi			√		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan Menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan pada Pasal 4	Triwulan III
264	Perubahan Atas Pergub Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi			√		1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral	Triwulan IV
265	Perubahan Atas Pergub Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Ketenagalistrikan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi			√		1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral	Triwulan IV
266	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022 - 2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Update Pergub DKI No 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014 - 2019	Triwulan III
267	Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta 2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√			Menggantikan Pergub Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta 2021	Triwulan III
268	Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Gempa di Provinsi DKI Jakarta 2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Menggantikan Pergub Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Gempa di Provinsi DKI Jakarta 2021	Triwulan II

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/UKPD PEMRAKARSA	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
269	Desain Besar Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	Triwulan IV
270	Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga			√		Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda	Triwulan IV
271	Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Aspirasi Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Penyelenggaraan kewenangan daerah	Triwulan IV
272	Penyelenggaraan Pekan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Penyelenggaraan kewenangan daerah	Triwulan IV
273	Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Penyelenggaraan kewenangan daerah	Triwulan II

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 19651271996031003